

Kebijakan Pendidikan serta Implementasi Kebijakan Pendidikan

Aulia Alfirzan, Yuris Nasri, Nurhizrah Gistituati

Pendidikan Dasar, Universitas Negeri Padang

Email: auliaalfirzan90@gmail.com, Yurisasri15@gmail.com, icha_y@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang kebijakan pendidikan serta implementasi kebijakan pendidikan. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah teknik penelitian pustaka. Kajian menulis atau kajian pustaka merupakan suatu gerakan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber pemahaman. Informasi yang digunakan untuk menyelesaikan artikel ini berasal dari sumber-sumber seperti buku, buku harian dan artikel sesuai pemeriksaan ini. Manfaat dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mengimplementasikan kebijakan pendidikan di sekolah dasar terutama bagi kepala sekolah dan guru-guru di sekolah agar lebih paham dengan kebijakan yang akan dibuat.

Kata kunci: *kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan*

Abstract

This paper discusses education policy and education policy implementation. The method used in this article is library research techniques. Writing study or literature review is a movement to collect information from various sources of understanding. The information used to complete this article comes from sources such as books, diaries and articles as per this examination. The benefit of this research is to find out how to implement education policies in primary schools, especially for school principals and teachers in schools so that they are more familiar with the policies that will be made.

Keywords: *education policy, education policy implementation*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah masalah yang sangat penting untuk menentukan pergantian peristiwa dan indikasi orang, dan untuk keberadaan suatu negara. Memahami pentingnya bagian pelatihan sebagai pendorong utama untuk kemajuan suatu negara, otoritas publik secara konsisten berusaha untuk menyelesaikan perubahan di bidang sekolah, terutama yang diidentifikasi dengan fakultas pengajaran, pembiayaan, kerangka kerja, program pendidikan, dll.

Dalam mengawasi pengajaran, khususnya di sekolah, itu adalah pelaksanaan atas sekolah sehingga sifat pelatihan di sekolah berselera tinggi dengan menyebarkan program, dimulai dengan menyebutkan kebutuhan SDM yang benar-benar ingin menyelesaikan tugas, pengaturan pengiriman sebagai proyek kepala sekolah dan rencana pendidikan yang akan dilaksanakan di sekolah.

Sekolah adalah suatu lembaga sosial yang memiliki kapasitas mendasar dalam mendorong kepribadian siswa dalam mengubah karakter sosial melalui pembelajaran dan pembelajaran yang terkoordinasi dengan rencana pendidikan yang memuat berbagai informasi dan kualitas yang berfungsi di mata masyarakat untuk mengajar dan meningkatkan kualitas pendidikan. keberadaan negara Indonesia. Karenanya, membuat pelatihan sekolah akan memiliki komitmen yang signifikan untuk kemajuan suatu negara dengan tujuan agar realitasnya tidak dapat diabaikan sebagai wadah untuk mengajar dan mengajar ilmu pengetahuan bagi siswa dari satu zaman ke zaman lainnya.

Dalam mempersiapkan (SDM) untuk kemajuan, persekolahan tidak hanya berpusat pada

kebutuhan materi saja tetapi harus berhubungan dengan kesiapan dalam memberikan mentalitas terhadap visi dan misi pengajaran, seperti pertimbangan menyeluruh mengenai yang mulia dan moral serta etika yang terhormat. Untuk situasi ini, tingkat pelatihan dipengaruhi oleh peningkatan kerangka kerja untuk semua bagian sekolah, khususnya lingkungan belajar yang mendukung, perluasan sifat pengajaran dan penyebaran pendidik yang tidak memihak, aset pembelajaran, program pendidikan yang lebih baik, kantor dan yayasan yang memadai, dan dijunjung tinggi oleh pendekatan pemerintah (political will), baik fokal maupun teritorial. Selain itu, menggabungkan pendekatan kepala. Seperti yang diindikasikan oleh Zulfadiah (2021) ketua adalah orang yang berperan dalam pelaksanaan pembelajaran di pergaulan sekolah.

Di bidang pengajaran di zaman globalisasi, masalah utama untuk bidang pelatihan di negara kita adalah tidak adanya sifat sekolah di berbagai tingkatan dan jenis pelatihan. Pertemuan individu yang berbeda-beda, termasuk para ahli pelatihan, bahwa persoalan hakikat persekolahan merupakan interaksi pengajaran sebagai salah satu sudut yang dapat menghambat penataan (SDM) sebagai modal prinsip perbaikan masyarakat di berbagai bidang. Khususnya sifat pengajaran pada tingkat pelatihan esensial, masih rendah

Sifat pelatihan pendirian sekolah sangat diperlukan karena sekolah tersebut adalah pembuat atribut pengganti negara. Menghasilkan IQ (tingkat kecerdasan), Enthusiastic Remainder (EQ), Passionate Otherworldly Remainder (ESQ). Kepala sebagai pionir yang disematkan dapat membentuk lulusan yang diinginkan oleh negara dan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Kualitas pengajaran tidak hanya dilihat dari sifat alumnyanya tetapi juga mencakup bagaimana lembaga pendidikan dapat memahami kebutuhan staf pengajar, siswa, wali dan lingkungan setempat sesuai dengan norma kualitas yang berlaku.

Sesuai dengan perkembangan zaman yang terus bergerak menuju kemajuan, di masa persaingan bebas semakin bebas seperti saat ini. Kepala yayasan pendidikan diperlukan untuk memiliki pilihan untuk mempertaruhkan gelar sekolah berkualitas karena pelatihan yang kualitasnya tidak dapat diterima dalam jangka panjang akan ditinggalkan oleh daerah setempat dan ditinggalkan tanpa bantuan dari orang lain.

Oleh karena itu, sekolah dituntut memiliki pilihan untuk mendorong sifat pengajaran melalui pelaksanaan pengaturan kepala sekolah untuk mengontrol dan mengawasi latihan di sekolah sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan instruktur, dan pada akhirnya meningkatkan prestasi belajar siswa dan penataan SDM dalam peningkatan. Eksekusi pendidik dengan mengawasi latihan sekolah yang dibentuk oleh kepala.

Jadi apakah mutu adalah mutu di sekolah dapat ditemukan di bagian kepala dalam meningkatkan sifat pelatihan. Pengawasan yang baik dan benar dan dewan sebagai target adalah kunci sifat latihan dan proyek sekolah. Oleh karena itu, para kreator tertarik untuk mengangkat predikat pendekatan sentral dalam meningkatkan hakikat pelatihan di sekolah dasar.

METODE

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah teknik penelitian pustaka. Kajian menulis atau kajian pustaka merupakan suatu gerakan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber pemahaman (Harahap: 2014). Informasi yang digunakan untuk menyelesaikan artikel ini berasal dari sumber-sumber seperti buku, buku harian dan artikel sesuai pemeriksaan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan dibuat dengan pendekatan dalam perumusannya. Pendekatan dalam perumusan kebijakan Pendidikan dapat dijelaskan sebagaimana paragraf dibawah ini

Pendekatan *Social Demand Approach* (kebutuhan sosial)

Sosial demand approach adalah metodologi dalam rencana strategi pembelajaran yang bergantung pada keinginan, permintaan, dan kepentingan berbeda yang digerakkan oleh daerah setempat. Dalam pendekatan semacam ini, produsen strategi awalnya akan menyelidiki dan mengidentifikasi tujuan yang dibuat di arena publik sebelum mereka menentukan pengaturan sekolah yang mereka tangani. Pendekatan kepentingan sosial sebenarnya tidak sekedar bereaksi terhadap keinginan daerah setempat sebelum rencana strategi persekolahan, tetapi juga menanggapi permintaan daerah setempat setelah strategi pelatihan dilaksanakan. Dipercaya bahwa minat warga dari semua lapisan masyarakat akan terjadi baik selama perencanaan maupun pelaksanaan strategi pelatihan. Dalam definisi pendekatan, hal itu dapat diatur dengan sangat baik ke dalam jenis strategi yang merinci yang bersifat laten. Artinya, pengaturan lain bisa dirinci jika ada permintaan dari daerah setempat terlebih dahulu.

Pendekatan *Man-Power Approach*

Pendekatan semacam ini nol tambahan pada pemikiran yang masuk akal untuk dibuat aksesibilitas SDM yang memuaskan di mata publik. Pendekatan ketenagakerjaan ini tidak memandang apakah ada kepentingan dari daerah setempat, terlepas dari apakah daerah tersebut meminta untuk membuat strategi penyuluhan khusus atau tidak, namun yang utama adalah seperti yang ditunjukkan oleh perenungan yang wajar dan visioner menurut perspektif pencipta strategi. Otoritas publik sebagai pelopor yang memiliki kekuatan untuk merinci pengaturan memiliki keaslian yang kokoh untuk membentuk pendekatan instruktif. Bagian penting dari pendekatan jenis kedua ini dapat direalisasikan, bahwa pendekatan ini pada umumnya lebih tiran. Pendekatan ketenagakerjaan tidak memperhatikan ukuran aturan mayoritas dalam definisi strategi instruktif, terlihat bahwa rencana pengaturan tidak dimulai dari tujuan dan permintaan daerah setempat, namun dengan cepat dibentuk oleh permintaan masa depan seperti yang terlihat oleh kepala visioner. Tampaknya ada kursus diktator dalam pendekatan jenis kedua ini. Namun, dari sisi positifnya, dalam pendekatan tenaga kerja ini, ukuran perincian strategi instruksi saat ini lebih efektif dalam siklus rencana, dan memiliki semua pengukuran jarak yang lebih jauh (Arif Rohman, 2009: 114-118).

Pendekatan instruktif adalah pengaturan publik di bidang pelatihan. Buku referensi mengungkapkan bahwa strategi pelatihan diidentifikasi dengan bermacam-macam hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan kerangka instruksi, yang menggabungkan tujuan instruktif dan bagaimana mencapai tujuan tersebut (Riant Nugroho, 2008: 36). Seperti yang diungkapkan oleh Imprint Olsen dan Anne-Maie O'Neil, strategi persekolahan adalah jalan menuju kebesaran, bahkan hadirnya suatu negara dalam persaingan global, dengan tujuan agar strategi pelatihan perlu mendapat perhatian pertama di masa globalisasi. Salah satu perdebatan utama adalah bahwa globalisasi membawa kualitas berbasis popularitas. Sistem aturan mayoritas yang membuahkan hasil adalah pemerintahan kerakyatan yang dijunjung tinggi dengan pelatihan (Riant Nugroho, 2011: 36). Marget E. Goertz berpendapat bahwa strategi persekolahan diidentikkan dengan produktivitas dan kecukupan rencana keuangan pelatihan (Riant Nugroho, 2008: 37). Seperti yang diungkapkan sebelumnya, strategi pengajaran dianggap oleh spesialis sebagai fitur pengaturan publik, khususnya pendekatan terbuka di bidang persekolahan. Strategi sekolah selanjutnya harus sesuai dengan pengaturan publik. Berkenaan dengan strategi publik pada umumnya, menjadi strategi kemajuan yang spesifik, strategi penting untuk pendekatan publik. Strategi pengajaran dianggap sebagai pengaturan di bidang persekolahan, untuk mencapai tujuan kemajuan negara di bidang pelatihan, sebagai salah satu bagian dari tujuan perbaikan umum negara.

Secara hipotetis, pengaturan instruktif digambarkan tergantung pada premis pemikiran eksperimental yang lebih logis. Ujian ini menggunakan berbagai macam

pendekatan seperti yang ditunjukkan oleh kesepakatan hipotetis yang dianut oleh setiap produsen aransemen. Dalam pengujian ini, dalam setiap peristiwa terdapat dua metodologi yang dapat ditetapkan kepada determinan / ahli dalam membentuk strategi pelatihan (Arif Rohman, 2009: 114).

Aspek-aspek yang tercakup dalam Kebijakan Pendidikan

Aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan menurut H.A.R Tilaar & Riant Nugroho dalam Arif Rohman (2009: 120):

1. Pendekatan instruktif adalah bagian tak terpisahkan dari naluri manusia sebagai pribadi dalam iklim manusia. Penataan instruktif merupakan interpretasi dari visi dan misi persekolahan dalam budaya tertentu.
2. Pengaturan instruktif dibawa ke dunia dari studi sekolah sebagai ilmu akal sehat, khususnya solidaritas antara hipotesis dan praktik instruktif. Strategi pelatihan menggabungkan interaksi investigasi strategi, rencana strategi, pelaksanaan dan penilaian.
3. Pendekatan instruktif harus memiliki legitimasi dalam peningkatan individu dan masyarakat yang mengenyam pendidikan ini. Untuk pergantian peristiwa tunggal, legitimasi pendekatan instruktif muncul dalam komitmennya terhadap siklus kebebasan individu dalam perbaikan diri mereka.
4. Transparansi (penerimaan). Siklus instruktif sebagai siklus welas asih terjadi dalam pergaulan yang bersahabat. Ini mengimplikasikan bahwa persekolahan memiliki keterkaitan dengan lingkungan sekitar. Jika pembelajaran memiliki tempat dengan daerah setempat, maka suara daerah di tingkat yang berbeda dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian strategi sekolah perlu mendengar suara atau gagasan dari daerah setempat.
5. Pengaturan instruktif didukung oleh karya inovatif. Pendekatan instruktif bukanlah sesuatu yang unik namun dapat dilakukan. Strategi instruksi adalah keputusan dari opsi pengaturan yang berbeda sehingga penting untuk melihat hasil dari pendekatan secara praktis.
6. Penyelidikan strategi seperti berbagai jenis pendekatan seperti strategi moneter, pengaturan penjaga publik dan berbagai pendekatan dalam strategi terbuka memerlukan pemeriksaan strategi.
7. Strategi pembelajaran pertama kali diarahkan pada kebutuhan siswa. Strategi instruktif harus ditujukan pada pengaturan orang-orang terpelajar alami yang menjadi spesialis perubahan di masyarakat umum negara mereka.
8. Pengaturan instruktif ditujukan untuk pengembangan masyarakat aturan mayoritas. Understudies akan tetap menyendiri dan membangun karakternya sebagai individu inovatif yang mendukung dan menghibur dalam mengubah masyarakat umumnya. Strategi pengajaran harus bekerja dengan wacana dan komunikasi siswa dan instruktur, siswa dengan masyarakat, siswa dengan negara mereka dan akhirnya siswa dengan umat manusia di seluruh dunia.
9. Pendekatan instruktif diidentikkan dengan penjabaran misi pelatihan dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam hal visi pengajaran menggabungkan rencana teoritis, misi sekolah lebih berpusat pada pencapaian tujuan instruktif yang konkret. Strategi pengajaran adalah sesuatu yang unik yang terus berubah namun terkoordinasi dengan jelas.
10. Strategi instruksi harus didasarkan pada kemahiran. Strategi instruktif bukan hanya definisi perilaku verbal dalam pelaksanaan praksis instruktif. Strategi instruktif harus dijalankan di mata publik, dalam organisasi instruktif. Strategi sekolah yang menyeluruh adalah strategi pengajaran yang mempertimbangkan kapasitas di lapangan,

dengan cara ini perenungan terhadap kapasitas staf, aksesibilitas aset, pelaksanaan yang mantap dan ditegakkan oleh kemampuan kerja yang inovatif merupakan persyaratan untuk strategi pelatihan yang produktif.

11. Strategi pembelajaran tidak bergantung pada kekuasaan tetapi pada persyaratan siswa. Kita telah melihat bahwa pelatihan sangat erat kaitannya dengan kekuatan. Memahami hal ini, kekuatan harus dikoordinasikan bukan untuk mengontrol siswa tetapi untuk bekerja dengan kemajuan kebebasan siswa. Kekuatan sekolah sehubungan dengan mayoritas masyarakat bukan untuk mengontrol siswa, tetapi kemampuan untuk bekerja dengan pengembangan dan pengembangan siswa sebagai warga negara yang imajinatif dan bermanfaat.
12. Pendekatan instruktif tidak bergantung pada naluri atau kelihaihan yang tidak masuk akal. Pengaturan instruktif adalah hasil dari penanganan yang bijaksana atas berbagai pilihan dengan menetapkan pilihan yang dipandang paling produktif dan menarik dengan mempertimbangkan berbagai jenis bahaya dan jawaban untuk jawaban mereka. Strategi sekolah alamiah akan memiliki arah yang benar namun mubazir dan kacau, yang menyebabkan inefisiensi. Lebih jauh, strategi alami tidak harus didukung oleh karya inovatif. Penegasan strategi sekolah naluriah akan sulit dilakukan dalam jangka waktu tertentu sehingga mubazir. Strategi naluriah akan menjadikan siswa sebagai subjek tes.m. Kejelasan tujuan akan melahirkan kebijakan pendidikan yang tepat.

Strategi pembelajaran dengan kursus yang tidak jelas akan menghilangkan kepentingan siswa. Seperti yang telah dijelaskan, interaksi instruktif merupakan siklus yang memperhatikan kesempatan siswa. Siswa bukanlah objek dari upaya pembelajaran tetapi subjek dengan kebijakan.

Pendekatan instruktif ditujukan untuk menangani kebutuhan siswa dan bukan pemenuhan pegawai. Tahapan awal dari semua pendekatan instruktif adalah untuk kepentingan mahasiswa atau kebebasan mahasiswa (H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, 2008: 141-153).

Kriteria Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus yakni: (1) Memiliki tujuan instruktif: Pendekatan instruktif harus memiliki tujuan, namun lebih eksplisit, yang harus memiliki tujuan instruktif yang jelas dan terpandu untuk ditambahkan ke pelatihan (2) Memiliki sudut pandang yang layak: Strategi instruksi jelas akan diberi wewenang, jadi penting untuk memenuhi prasyarat yang harus dipenuhi sehingga strategi pelatihan dianggap dan berlaku sah untuk suatu daerah. Sejalan dengan itu, pendekatan instruktif harus memenuhi prasyarat yang ditetapkan sesuai dengan materi sistem progresif sakral di sebuah distrik sehingga sangat mungkin diumumkan secara sah dan sah secara substansial di sekitar sana. Dengan tujuan agar pendekatan instruktif yang tulus dapat dimunculkan. (3) Memiliki ide operasional: Strategi pelatihan sebagai aturan keseluruhan, tentunya harus memiliki keuntungan operasional yang akan dilaksanakan dan ini merupakan kebutuhan mutlak untuk menjelaskan pencapaian tujuan instruktif yang akan dicapai. Selain itu, persyaratan untuk pendekatan instruktif adalah pekerjaan bantuan pilihan. (4) Dibuat oleh para ahli: Strategi persekolahan harus dilakukan oleh tenaga ahli dibidangnya yang memiliki kekuatan untuk melakukan hal tersebut, dengan tujuan agar tidak mengganggu pelatihan dan iklim diluar pengajaran. Eksekutif instruktif, pengawas lembaga pendidikan dan legislator yang secara langsung diidentifikasi dengan sekolah adalah komponen dasar dari produsen strategi pembelajaran. (5) Bisa dinilai: Jelas, strategi instruksi tidak dibebaskan dari keadaan asli untuk ditindaklanjuti. Dengan asumsi itu dapat diterima, itu disimpan atau dibuat, tetapi jika ada kesalahan, itu harus diperbaiki.

Oleh karena itu, pengaturan instruktif memiliki karakter yang memungkinkan penilaian yang sederhana dan layak dari mereka. (6) Memiliki sistematika: Strategi sekolah jelas merupakan kerangka kerja juga, dengan cara ini harus memiliki sistematika yang masuk akal sehubungan dengan semua sudut yang perlu dikelola. Sistematika juga diperlukan untuk memiliki kecukupan dan kecakapan tinggi sehingga pengaturan instruktif tidak membumi, tidak adil dan terutama rumit karena perkembangan variabel yang hilang atau bertabrakan satu sama lain. Ini harus dipandang dengan hati-hati sehingga pelaksanaannya nanti tidak menyebabkan kerusakan yang sah di dalamnya. Pada titik itu, dari jauh, strategi sekolah harus digabungkan dengan pendekatan yang berbeda seperti pengaturan politik, pengaturan terkait uang, bahkan strategi instruksi di atas atau di samping dan di bawahnya (Ali Imron, 1995: 20).

Implementasi Kebijakan Pendidikan

Secara etimologis, kata *execution* ketika disinggung dari referensi Word Webster, khusus untuk melaksanakan bermaksud untuk mencapai sesuatu). Dengan cara yang sama, eksekusi strategi adalah tahap pragmatis daripada rencana masalah atau definisi strategi sebagai tahap hipotetis (Muhammad Jumhadi dan Wa Rijo, 2008). Mengenai arti pelaksanaan strategi, para ahli dapat menyinggung penilaian, termasuk Anderson (2006) yang berpendapat bahwa pelaksanaan pengaturan adalah aplikasi oleh aparat pengatur pemerintah untuk masalah tersebut.

Dalam sudut pandang lain, Solichin Mujianto (2015: 151) menyatakan bahwa eksekusi strategi adalah siklus yang panjang dalam mengurus masalah, bagaimana strategi entertainer melakukan pilihan strategi. Dimana kegiatan umum mitra (mitra) ditujukan untuk mencapai target strategi. Hal yang persis sama diklarifikasi bahwa pelaksanaan pengaturan adalah cara yang diselesaikan sehingga strategi otoritatif dapat mencapai tujuan dan target yang dinyatakan dengan secara langsung melaksanakannya sebagai program tindakan atau melalui pendekatan anak perincian (induksi) dari pendekatan aktual sebagai ilustrasi pengaturan atau yang sering disebut sebagai pedoman. eksekusi (Riant Nugroho, 2009).

Eksekusi strategi terdiri dari perspektif yang berbeda antara lain; 1) pendekatan yang dikagumi; desain kerjasama dimulai oleh pembuat strategi, tujuannya adalah untuk memberi energi, memberi pengaruh dan menghidupkan pertemuan tujuan untuk melaksanakannya, 2) pertemuan target; Bagian dari pengaturan pertemuan terkait (mitra strategi) diandalkan untuk menerima contoh komunikasi oleh produsen strategi. Karena gathering ini merupakan tujuan dari pelaksanaan strategi, maka diyakini contoh perilaku akan diubah sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan, 3) melakukan asosiasi; pendekatan organisasi pelaksana bertanggung jawab untuk melaksanakan pengaturan dan faktor alam; Komponen dalam iklim umum juga mempengaruhi pelaksanaan strategi seperti bagian dari kebiasaan sosial, realitas sosial, ketergantungan keuangan dan politik (Smith 197 3; Islamy, 2003; Riadi, 2018).

Dari penggambaran di atas dapat dikombinasikan dengan sangat baik, pelaksanaan strategi pelatihan merupakan interaksi mengatasi masalah instruktif untuk mengetahui tujuan strategi dengan melewati siklus (sistem penyampaian) yang sesuai dengan metode dan hasil strategi yang dapat diapresiasi oleh semua mitra sekolah, tingkatkan konsistensi dan permintaan otoritatif. Pelaksanaan pengaturan instruksi merupakan pergerakan yang signifikan setelah suatu pendekatan dirinci. Tanpa eksekusi, strategi instruksi yang telah dirinci akan menjadi berlebihan atau tidak berarti. Sejalan dengan itu, pelaksanaan strategi persekolahan memiliki pekerjaan dan posisi yang sangat esensial (signifikan) dalam pendekatan terbuka secara keseluruhan (Iwan Satibi, 2010; 25)

Sasaran pelaksanaan strategi dibentuk menjadi program kegiatan yang direncanakan dan dibiayai. Program ini dilakukan sesuai rencana. Pelaksanaan pengaturan instruktif untuk mencapai tujuan dengan baik, penting untuk fokus pada substansi strategi dan pengaturan pelaksanaan. (Nakamura dan Smallwood, 1980).

Substansi dari pendekatan tersebut meliputi; 1) kepentingan yang dipengaruhi oleh

pengaturan (dipengaruhi premium), 2) berbagai jenis keuntungan yang akan diciptakan (jenis keuntungan), 3) tingkat kemajuan yang diinginkan (perluasan iklim kemajuan), 4) posisi produsen strategi (situs dinamika), 5) pelaksana program yang harus ditopang oleh pelaksana yang cakap (praktisi program) dan 6) aset yang dapat dikumpulkan untuk melaksanakan strategi / aset yang diajukan (Merilee S. Grindle. 1980).

Untuk sementara, pengaturan eksekusi terdiri dari; 1) kekuatan, minat dan prosedur para penghibur yang bersangkutan (termasuk kekuatan, dan sistem penghibur), 2) kualitas organisasi dan sistem yang berkuasa sebagai iklim untuk melaksanakan pengaturan yang akan dilakukan (sistem kelembagaan characteristic), 3) tingkat konsistensi dan reaksi pelaksana karena pelaksanaan strategi (konsistensi dan responsivitas) (Muchlisin Riadi, 2016)

Tahapan Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi kebijakan pendidikan adalah interaksi yang membingungkan dan kompleks. Jadi Eugene Bardch (2006) melihat implementasi kebijakan cukup untuk membuat program dan pengaturan umum yang terlihat bagus di atas kertas. Fakta dari masalah ini sulit untuk direncanakan dengan kata-kata dan merek dagang yang terdengar lelah di telinga para pemimpin dan bawahan yang mendengarkan dan lebih sulit untuk implementasi kebijakan dalam berbagai struktur dan cara yang memenuhi semua pertemuan, termasuk klien (Leo Agustino, 2014).

Implementasi kebijakan adalah fase melakukan pendekatan instruktif yang merupakan hubungan yang rumit dengan perhatian pada dua hal, khususnya; a) definisi tujuan strategi instruktif harus secara jelas memasukkan pertemuan obyektif; yang mengambil bagian; dan bagaimana strategi sekolah harus dilaksanakan; dan b) aset pendukung yang sesuai, dengan alasan tanpa pembiayaan strategi tidak akan pernah diakui sepenuhnya (Jusdin dan Rusdiyanto, 2013).

Pendekatan Implementasi Kebijakan Pendidikan

Sebagian dari metodologi yang biasa digunakan oleh para ahli adalah melaksanakan strategi, perspektif hierarkis dan granular (Wibawa; 1994, Feis Imronah, 2009). Metodologi hirarkis, tepatnya metodologi pengurangan pilihan strategi yang unik atau berskala besar ke dalam kegiatan konkrit atau miniatur. Perspektif granular, tepatnya metodologi yang berasal dari bawah (wilayah lokal), bergantung pada interaksi tatanan yang dimulai dari meneruskan keinginan lapisan bawah masyarakat, sebagai ajakan atau backing.

Model Implementasi Kebijakan Pendidikan

Model implementasi kebijakan pendidikan dapat berupa ide, garis besar, diagram atau kondisi numerik, yang digunakan untuk memperjelas, mengklarifikasi, dan memperkirakan komponen dari suatu keadaan masalah instruktif untuk diperbaiki dengan mengirimkan proposal dan perkembangan kegiatan untuk mengatasi masalah yang meragukan dan menangkap mata publik. Model juga dapat melalui peningkatan kebenaran dari realitas yang dibahas (Asmad Hanisy, 2013). Kapasitas fundamental model di sini adalah untuk mempermudah klarifikasi ide. Dalam contoh tertentu, model bergantung pada hipotesis.

Ada dua model implementasi kebijakan pendidikan yang ampuh, yaitu model langsung dan model intuitif (Baedhowi, 2004: 47). Model langsung dalam pelaksanaan strategi merupakan tahapan dinamis yang signifikan, sedangkan tahapan pelaksanaan pendekatan secara teratur cukup menonjol untuk diperhatikan karena dipandang sebagai kewajiban dari pertemuan yang berbeda. Pencapaian eksekusi strategi bergantung terutama pada kemampuan unit pelaksana. Dalam hal pelaksanaan pengaturan gagal, seringkali agen (eksekutif) yang dituduh, karena dianggap perlu tanggung jawab, sehingga dianggap penting untuk melakukan upaya yang lebih baik untuk membangun batasan penyelenggaraan organisasi.

Sementara itu, model pelaksanaan strategi yang cerdas dipandang sebagai siklus yang unik, dengan alasan bahwa setiap pertemuan yang terlibat dengan pelaksanaan strategi dapat

mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Misalnya, ketika strategi pembelajaran Full Daya School (FDS) dianggap oleh daerah setempat tidak memenuhi asumsi mitra. Ini menyiratkan bahwa berbagai tahapan pelaksanaan strategi FDS akan diselidiki, dinilai oleh pertemuan. Dengan tujuan agar kemungkinan, kualitas dan kekurangan dari setiap periode pelaksanaan dapat dikenali dan diperbaiki dengan cepat untuk mencapai tujuan tersebut.

SIMPULAN

Pendekatan *Social Demand Approach* (kebutuhan sosial) adalah metodologi dalam rencana strategi pembelajaran yang bergantung pada keinginan, permintaan, dan kepentingan berbeda yang digerakkan oleh daerah setempat. Yang kedua Pendekatan *Man-Power Approach* adalah Pendekatan semacam ini nilai tambahan pada pemikiran yang masuk akal untuk dibuat aksesibilitas SDM yang memuaskan di mata publik.

Aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan menurut H.A.R Tilaar & Riant Nugroho dalam Arif Rohman (2009: 120): Pendekatan instruktif, Pengaturan instruktif, Pendekatan instruktif, Transparansi (penerimaan), Pengaturan instruktif, Penyelidikan strategi, Strategi pembelajaran, Pengaturan instruktif, Pendekatan instruktif, Strategi instruksi, Strategi pembelajaran, Pendekatan instruktif tidak bergantung pada naluri atau kelihaihan yang tidak masuk akal. Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus yakni: Memiliki tujuan instruktif, Memiliki sudut pandang yang layak, Memiliki ide operasional, Dibuat oleh para ahli, Bisa dinilai, Memiliki sistematika

Interaksi mengatasi masalah instruktif untuk mengetahui tujuan strategi dengan melewati siklus (sistem penyampaian) yang sesuai dengan metode dan hasil strategi yang dapat diapresiasi oleh semua mitra sekolah, tingkatkan konsistensi dan permintaan otoritatif. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan strategi pelatihan adalah 1) kepentingan yang dipengaruhi oleh pengaturan (dipengaruhi premium), 2) berbagai jenis keuntungan yang akan diciptakan (jenis keuntungan), 3) tingkat kemajuan yang diinginkan (perluasan iklim kemajuan), 4) posisi produsen strategi (situs dinamika), 5) pelaksana program yang harus ditopang oleh pelaksana yang cakap (praktisi program) dan 6) aset yang dapat dikumpulkan untuk melaksanakan strategi / aset yang diajukan (Merilee S. Grindle. 1980).

Implementasi kebijakan pendidikan adalah interaksi yang membingungkan dan kompleks. Pendekatan Implementasi Kebijakan Pendidikan; Metodologi hirarkis, tepatnya metodologi pengurangan pilihan strategi yang unik atau berskala besar ke dalam kegiatan konkrit atau miniatur. Perspektif granular, tepatnya metodologi yang berasal dari bawah (wilayah lokal), bergantung pada interaksi tatanan yang dimulai dari meneruskan keinginan lapisan bawah masyarakat, sebagai ajakan atau backing.

Ada dua model implementasi kebijakan pendidikan yang ampuh, yaitu model langsung dan model intuitif (Baedhowi, 2004: 47). Model langsung dalam pelaksanaan strategi merupakan tahapan dinamis yang signifikan, sedangkan tahapan pelaksanaan pendekatan secara teratur cukup menonjol untuk diperhatikan karena dipandang sebagai kewajiban dari pertemuan yang berbeda. Sementara itu, model pelaksanaan strategi yang cerdas dipandang sebagai siklus yang unik, dengan alasan bahwa setiap pertemuan yang terlibat dengan pelaksanaan strategi dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 1991. Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ali Imron. (1995). Pembinaan Guru di Indonesia. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Harahap, N. 2014. Penelitian Kepustakaan. Jurnal Iqra'. Vol 8. No.1

- Zuldesiah, Nurhizrah Gistituati, Ahmad Subandi. (2021). Kontribusi Gaya Kepemimpinan dan Pelaksanaan Supervisi Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru-guru Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*. 5(2), 663-671. <http://jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/791/pdf>
- Rohman, Arif. 2002. *Jurnal Fondasia (Akar Ideologis Problem Kebijakan Pendidikan di Indonesia)*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan UNY.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Polic*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Jumhadi Muhammad dan Warijo (2018), Implementasi Penyediaan dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) untuk Pembiayaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Medan Tahun Anggaran 2009-2011, *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) JAP* Vol. 1 No.2 Desember 2013.
- Anderson, James E. (2006), *Public Policy Making*, Holt Rinehart & Winston, New York.
- Solichin, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 148-178.
- Nugroho, Riant Dwijowijoto, n(2009), *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Riadi, Muchlisin, (21 Maret 2016), *Pengertian dan Implementasi Kebijakan*, <https://www.kajianpustaka.com/2016/03/pengertian-dan-implementasi-kebijakan.html>, diakses 5 Oktober 2018
- Nakamura, Rober T and Frank Smallwood, (1980) *The Politics of Policy Implementation*, New York St. Martin Press.
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Prinnton University Press, New Jersey.
- Agustino, Leo. (2006), *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: CV Alfabeta.
- Wibawa, Samodra. (1994), *Kebijakan Publik*, Jakarta; Intermedia
- Hanisy, Asmad. (2013). Konsep dasar analisis kebijakan. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 4(1), 48-63.
- Baedhowi. (2004), *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Studi Kasus di Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta*, Disertasi Departemen Ilmu Administrasi FISIP Uni versitas Indonesia, Jakarta.